



LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
KE KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**AKSELERASI KEBERHASILAN
PROGRAM KELUARGA BERENCANA**

**TANGGAL 30 JANUARI 2020
SAMPAI DENGAN
TANGGAL 1 FEBRUARI 2020**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, FEBRUARI 2020**



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
AKSELERASI KEBERHASILAN PROGRAM BERENCANA
KE KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
TANGGAL 30 JANUARI S.D. 1 FEBRUARI 2020**

I. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan nasional juga merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.

Penduduk yang besar adalah salah satu modal dasar pembangunan nasional jika penduduk menjadi basis yang integral dalam perencanaan pembangunan. Menurut UNDP, penduduk adalah kekayaan nyata suatu bangsa. Negara Indonesia menempati urutan keempat sebagai negara dengan penduduk terbanyak setelah Cina, India dan Amerika. Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 jumlah penduduk Indonesia pada 2020 sebanyak 269,6 juta jiwa. Namun, jumlah penduduk yang besar ini belum menjadi pendorong pembangunan nasional, sebaliknya Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks di bidang kependudukan.

Secara nasional pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat, walaupun ada kecenderungan menurun. Antara tahun 1961 – 1971 pertumbuhan penduduk sebesar 2,1 persen pertahun, tahun 1971 – 1980 sebesar 2,32 persen pertahun, tahun 1980 – 1990 sebesar 1,98 persen pertahun, dan periode 1990 – 2000 sebesar 1,6 persen pertahun dan menurun menjadi 1,49 persen pada tahun-tahun berikutnya. Laju pertumbuhan penduduk yang selalu diatas satu persen berdampak signifikan pada laju pembangunan wilayah dan kerusakan lingkungan yang semakin sulit dikendalikan. Selain itu, permasalahan lain adalah persebaran penduduk yang tidak merata baik persebaran antarpulau, provinsi, kabupaten maupun antara perkotaan dan pedesaan. Pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya ± 7

persen dari seluruh wilayah daratan Indonesia, dihuni lebih kurang 60 persen penduduk Indonesia.

Permasalahan kependudukan di Indonesia tidak hanya menyangkut kuantitas dan persebarannya saja, tetapi permasalahan kualitas. Kualitas penduduk dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan statistik gabungan dari harapan hidup, pendidikan, dan indeks pendapatan (ekonomi). Berdasarkan laporan UNDP yang merilis IPM tahun 2019, IPM Indonesia adalah 0.707 di tahun 2019 dan untuk pertama kalinya IPM Indonesia naik kelas menjadi negara dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi. Namun, Indonesia masih kalah jauh dengan negara tetangga Singapura dan Brunei Darussalam yang berada dikategori negara *very high human development*. Selain itu, kita masih mengalami permasalahan kesenjangan yang harus kita atasi bersama.

Kebijakan kependudukan juga diperhadapkan pada tantangan kelembagaan dan struktural dalam era otonomi daerah. Sejak otonomi daerah digulirkan sejak tahun 1999, banyak program terkait kependudukan yang tidak diprioritaskan oleh daerah. Hal ini terlihat dari tidak adanya SKPD khusus yang menangani urusan kependudukan. Imbas dari hal ini adalah menurunnya jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang merupakan ujung tombak program-program keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Pada periode tahun 2000, tenaga lini lapangan (PKB/PLKB) berjumlah hampir 47 ribu personil yang tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota. Saat ini jumlah tenaga PKB/PLKB yaitu sekitar 15 ribu orang dan satu penyuluh masih memegang sekitar 6-7 desa/kelurahan. Idealnya 1 orang penyuluh membina 1-2 desa/kelurahan sehingga saat ini ada kekurangan tenaga PKB/PLK sekitar 4000 orang. Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan kependudukan akan ditarik menjadi urusan Pemerintah Pusat sehingga permasalahan tenaga lini lapangan ini dapat diatasi pada masa yang akan datang.

Tantangan lain yang juga harus menjadi perhatian adalah bonus demografi yang harus menjadi alat penggerak ekonomi yang luar biasa. Bonus demografi adalah masa dimana jumlah penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut tidak banyak. Indonesia diperkirakan akan dapat menikmati bonus demografi mulai tahun ini sampai tahun 2030 dimana penduduk usia produktif akan mencapai 70 persen atau sekitar 180 juta penduduk, sedangkan sisanya, 30 persen, adalah penduduk yang tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun). Melimpahnya jumlah penduduk usia kerja akan menguntungkan dari sisi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Imbasnya adalah meningkatkannya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun berkah ini bisa berbalik menjadi bencana jika bonus ini tidak dipersiapkan kedatangannya. Masalah yang paling nyata adalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah

negara kita mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk menampung 70% penduduk usia kerja di tahun 2020-2030? Kalau pun lapangan pekerjaan tersedia, mampukah sumber daya manusia yang melimpah ini bersaing di dunia kerja dan pasar internasional?

Permasalahan kependudukan harus menjadi perhatian serius penyelenggara negara dalam hal ini Pemerintah sehingga generasi penerus bangsa tidak akan menanggung beban dampaknya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009 telah disahkan, disebutkan bahwa bahwa penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini sangat jelas bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh negara haruslah pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan kependudukan yang mengandung dua makna sekaligus yaitu, pertama, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Penduduk harus dijadikan subjek dan objek dalam pembangunan. Pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk. Makna kedua dari pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumber daya manusia.

Komisi IX DPR RI merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bertugas di bidang kesehatan dan bermitra kerja dengan Kementerian Kesehatan RI, Badan POM RI, BKKBN RI, dan BPJS Kesehatan. Di bidang kependudukan, Komisi IX DPR RI selalu menekankan pada Pemerintah dalam hal ini BKKBN untuk melaksanakan pembangunan kependudukan untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang dengan menurunkan laju pertumbuhan penduduk, mengatasi angka kesuburan total atau *Total Fertility Rate (TFR)* yang masih stagnan selama 10 tahun yaitu 2.6. Selain itu, dengan dukungan anggaran sekitar Rp 3.5 Trilyun pada tahun 2020 diharapkan ada penguatan kelembagaan BKKBN untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan oleh UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Program Keluarga Berencana (KB) di Kota Surabaya

Kota Surabaya dikenal sebagai kota yang pemerintah daerahnya serius dalam mendukung penerapan program KB dengan melakukan berbagai program dan terobosan. Program KB dilakukan secara terintegrasi dan inklusif dengan program pembangunan masyarakat lainnya. Sebagai contoh, program KB terintegrasi dengan program Konselor Sebaya di sekolah-sekolah yang juga

terhubung dengan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang ditujukan bagi keluarga, serta Kampung Pendidikan Kampunge Arek Suroboyo untuk mengedukasi masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga menggandeng ulama sebagai pemimpin komunitas-komunitas Islam untuk turut serta mendukung program KB. Keberhasilan program KB di Surabaya termasuk dalam hal pengendalian penduduk dan juga penerimaan alat kontrasepsi bagi pria yang selama ini masih perlu ditingkatkan.

Untuk itu, Komisi IX DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 ini mengagendakan kunjungan kerja spesifik ke 2 (dua) kota yaitu Kota Surabaya dan Kota Bogor yang dinilai dapat menjadi aspirasi bagi daerah lain dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga.

II. LANDASAN

Landasan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 55 ayat (1), Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96.
2. Kesimpulan Internal Rapat Komisi IX DPR RI tanggal 13 januari 2020.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Mendapatkan informasi dan gambaran secara komprehensif tentang struktur SKPD yang terlibat dalam program KB dan pembangunan keluarga di Kota Surabaya.
2. Mendapatkan informasi dan data tentang anggaran dalam APBD Kota Surabaya yang dialokasikan untuk program KB dan pembangunan keluarga.
3. Mendapatkan penjelasan yang komprehensif tentang pelaksanaan program KB dan pembangunan keluarga di Kota Surabaya dan terobosan-terobosan yang dilakukan untuk mencapai target.
4. Mendapatkan masukan dari beberapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait pelaksanaan program KB dan pembangunan keluarga di Kota Surabaya yang dapat menjadi masukan peningkatan program KB secara nasional.

IV. KELUARAN

Rekomendasi dari Komisi IX DPR RI diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah, khususnya BKKBN, untuk dapat mengambil terobosan dan kebijakan yang dapat mengakselerasi program KB dan pembangunan keluarga secara nasional.

V. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI telah dilakukan adalah pertemuan bersama dengan Walikota Surabaya yang dihadiri oleh:

1. Dinas Kesehatan Kota Surabaya

2. Dinas Sosial Kota Surabaya
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat & Keluarga Berencana (Bapemas & KB) Surabaya
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya
5. Kepala Kanwil BKKBN Jatim
6. Perwakilan PIK-R Surabaya
7. Perwakilan PKB/PLKB
8. Perwakilan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Kota Surabaya

VI. WAKTU PELAKSANAAN

Tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan Tanggal 1 Februari 2020.

VII. SUSUNAN ANGGOTA KUNKER SPESIFIK

Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Bapak H. Ansory Siregar, Lc dari Fraksi PKS. Adapun Anggota Komisi IX DPR RI yang menjadi tim Kunjungan Kerja Spesifik adalah sebagai berikut:

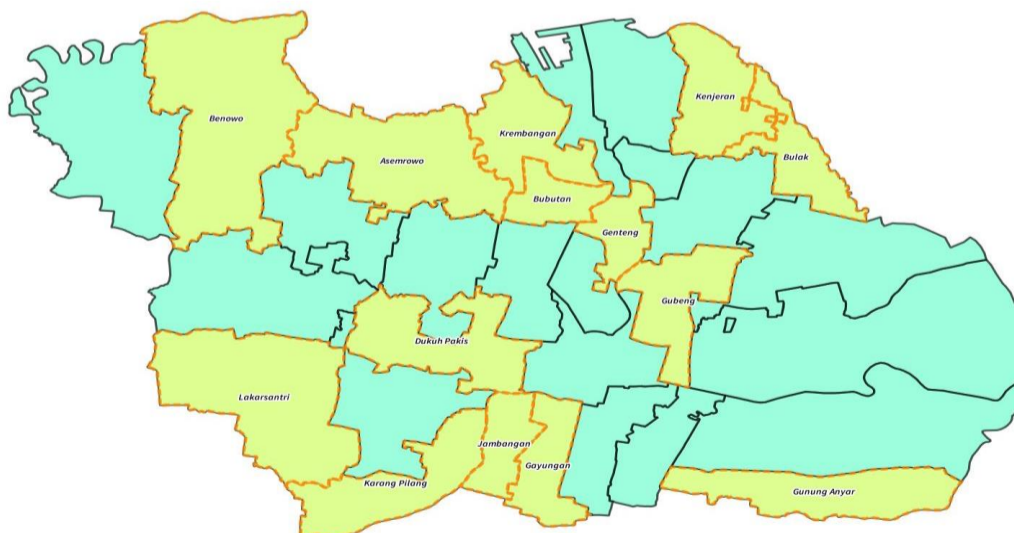
(Insert daftar nama)

VIII. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Profile Kota Surabaya yang ada dalam laporan ini bersumber dari RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 yang secara formal menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya No 10 Tahun 2016.

A. Kondisi Geografi

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang terletak antara 07°9' s.d 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d 112°54' Bujur Timur. Luas wilayah Kota Surabaya seluruhnya kurang lebih 326,36 km² yang terbagi dalam 31 Kecamatan dan 154 Desa/Kelurahan. Batas wilayah Kota Surabaya yaitu batas sebelah utara adalah Laut Jawa dan Selat Madura, batas sebelah selatan merupakan Kabupaten Sidoarjo, batas sebelah barat merupakan Kabupaten Gresik, serta batas sebelah timur adalah Selat Madura.



Gambar 1 Peta Kota Surabaya

Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, yaitu Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Jagir, dan Kali Lamong. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya sehingga dengan sendirinya Kota Surabaya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang melintas sehingga rawan banjir pada musim penghujan.

Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan, 154 kelurahan, 1368 Rukun Warga (RW) dan 9118 Rukun Tetangga (RT). Kota Surabaya adalah kota metropolitan kedua setelah Jakarta dan memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota di masa mendatang, diantaranya adalah sebagai Kawasan Strategis untuk Pendukung Pertumbuhan Ekonomi yaitu:

- Kawasan Pergudangan dan Industri Margomulyo di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun
- Kawasan Tunjungan dan sekitarnya di Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan Sebagai kawasan pusat perdagangan dan perkantoran, kawasan Tunjungan merupakan salah satu pusat kota yang sangat potensial untuk terus dikembangkan karena memiliki sejarah dan mengalami masa keemasan pada dekade 1940 hingga akhir 1970an dengan karakteristik shopping-street dan shopping arcade, sehingga dikenal dan menjadi salah satu icon kota Surabaya dengan Jargon “Rek Ayo Rek Mlaku – Mlaku nang Tunjungan”. Kawasan ini memerlukan penanganan dan pengelolaan yang optimal untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.
- Kawasan Kaki Jembatan Wilayah Suramadu-Pantai Kenjeran dan Kawasan Kota Tepi Pantai (Waterfront City) di Kecamatan Bulak berada di Unit Pengembangan III Tambak Wedi, merupakan kawasan strategis ditinjau dari lokasinya yang berada di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan pesisir Pantai Bulak - Kenjeran yang memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai wisata pesisir dan laut. Keberadaan Jembatan Suramadu dan Pantai Kenjeran diharapkan dapat memberikan peningkatan potensi dan peran Kota Surabaya, sebagai pusat kegiatan regional. Di samping itu, kawasan ini memiliki potensi sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala regional seperti terlihat pada data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kecamatan Bulak.
- Kawasan Kota Tepi Pantai (Waterfront City) di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan strategis dengan konsep pengembangan penggunaan lahan mixed-use pendukung kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Terminal Multipurpose Teluk Lamong sebagai kawasan pelabuhan penunjalng Pelabuhan Utama Tanjung Perak.

- Kawasan Terpadu Surabaya Barat di Kecamatan Pakal di Unit Pengembangan XII Sambikerep dan Benowo di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangon, merupakan kawasan terpadu yang pusatnya akan dikembangkan di Stadion Gelora Bung Tomo sebagai pusat olahraga berskala nasional dan akan terintegrasi dengan pengembangan fungsi perdagangan dan jasa di sekitarnya.

B. Kondisi Demografis

Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan, oleh karena itu penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Jumlah penduduk kota Surabaya semakin meningkat. Dibanding tahun sebelumnya, terdapat kenaikan jumlah penduduk di tahun ini. Jumlah penduduk Surabaya pada Bulan Januari 2019 sebanyak 3,095,026 jiwa dengan jumlah penduduk terpadat adalah Kecamatan Tambaksari dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Bulak. Menurut data perekaman KTP-EL, jumlah sudah rekam untuk warga Surabaya adalah 2,065,535 jiwa dari total jumlah wajib KTP sebesar 2,325,509 jiwa sehingga warga yang belum melakukan perekaman sebesar 259,974 jiwa, sedangkan data sampai Juli 2019 jumlah penduduk yang melakukan perubahan alamat sebesar 166.293 jiwa dan yang dilaporkan meninggal sejumlah 15.052 jiwa.

Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Masih terdapat beberapa kecamatan di Kota Surabaya yang memiliki tingkat kepadatan lebih dari 20.000 jiwa/km² dan umumnya wilayah kecamatan tersebut berada di wilayah Surabaya pusat dan utara. Oleh karenanya program-program terkait dengan penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan, pemberdayaan, keluarga berencana, sanitasi dan air bersih dapat diarahkan ke wilayah-wilayah yang padat penduduk sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, sosial maupun ekonomi warganya. Pembangunan juga diarahkan pada wilayah dengan kepadatan penduduk sedang dan rendah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

C. Profil Kemiskinan

Tren penurunan kemiskinan di Kota Surabaya hingga tahun 2018 terus menunjukkan kinerja yang sangat baik karena pada tahun ini kembali terjadi penurunan persentase penduduk miskin hingga level 4,88 persen. Penurunan pada tahun ini mencapai minus 0,51 persen dan relatif lebih tinggi dibanding penurunan pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar minus 0,24 persen.

Namun demikian, secara jangka panjang penurunan persentase penduduk miskin Kota Surabaya sudah berada pada fase melandai. Hal ini dapat

menjadi salah satu indikasi bahwa kemungkinan sebagian besar mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan adalah mereka yang masuk ke dalam kategori kemiskinan kronis (*chronic poverty*) atau ada pula yang menyatakannya sebagai *hardcore poverty*.

Pada tahun 2018, Garis Kemiskinan Kota Surabaya berada pada level Rp 530.178,- per Kapita per Bulan atau meningkat hampir 56 ribu rupiah dibanding Garis Kemiskinan pada tahun 2017. Walaupun terjadi kenaikan Garis Kemiskinan, jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 di Kota Surabaya justru berkurang hampir 14 ribu orang lebih menjadi hampir mencapai 141 ribu orang (4,88 persen) dibanding kondisi tahun 2017 yang hampir mencapai 155 ribu orang (5,39 persen).

Seiring penurunan persentase penduduk miskin, rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan tercatat sedikit bertambah dangkal yang diindikasikan oleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Surabaya pada tahun 2018 yang semakin dangkal 0,29 poin dibanding tahun sebelumnya menjadi 0,81 poin.

Begitu pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kota Surabaya juga tercatat sedikit merapat yang diindikasikan oleh adanya sedikit penurunan pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sekitar 0,13 poin menjadi 0,20 poin dibanding keadaan tahun 2017.

D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir.

Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Kota Surabaya mencapai IPM tertinggi di provinsi Jawa Timur yaitu IPM sebesar 81,74 yang masuk kategori IPM "Tinggi".

E. Program Kependudukan yang terintegrasi

Pemerintah Kota Surabaya mengintegrasikan seluruh program kependudukan dengan program pemberdayaan ekonomi dan juga kependudukan. Melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan fokus kepada pendidikan dan *well being* anak, Kota Surabaya menjadi *pioneer* berbagai program kreatif yang menjadikan Kota Surabaya contoh

bagi kota/kabupaten lain dalam menjalankan program pembangunan kependudukan.

- Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan pengembangan ekonomi kreatif melalui Program Pahlawan Ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh para ibu untuk membantu perekonomian keluarga. Dengan narasi bahwa ibu merupakan tiang keluarga. Jadi, perempuan harus tangguh, berdaya secara ekonomi. Dari rumah mereka bisa menjual produk-produk secara daring untuk mendukung suami. Laki-laki dan perempuan bisa saling mengisi. Karena perempuan juga bisa berkiprah di berbagai bidang.
- Kota Surabaya meluncurkan aplikasi bernama Puntadewa (Himpun Data Demografi Kawasan). Aplikasi ini berfungsi untuk mendata penduduk nonpermanen yang secara administratif masih tercatat di tempat asalnya. Program ini berdasarkan kebutuhan untuk mendata penduduk non permanen yang tinggal di Surabaya. Sebab Warga Negara Indonesia (WNI) berhak memilih dimana pun mereka tinggal. Puntadewa dibuat berdasarkan pedoman yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia nomor 14 tahun 2015, tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen. Selain itu, Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Pusat Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus (PPABK). Pusat pelayanan ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah Kota (Pemkot Surabaya) terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Walikota Risma menjelaskan maksud dan tujuan menyediakan fasilitas pelayanan anak berkebutuhan khusus untuk membangun pemerataan layanan tanpa diskriminasi, memberikan ruang penanganan bagi ABK dengan kesulitan belajar umum maupun khusus melalui pemberdayaan orang tua serta mengembangkan wadah edukasi bagi orang tua, guru, guru pendamping kelas untuk pengasuh dan pendidikan efektif.
- Kota Surabaya juga membangun Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang diperuntukkan bagi orang tua yang ingin mengkonsultasikan permasalahan putera/puterinya, khususnya yang mempunyai Anak dengan Kebutuhan Khusus (ABK). Puspaga melayani seluruh keluarga Surabaya setiap hari pukul 9 pagi hingga 4 sore. Setelah itu, dilakukan assement untuk menggali data kebutuhan anak lalu membuat program penanganan individual untuk anak dan melatih orang tua agar menindaklanjuti program tersebut. Saat ini ada sekitar 20 orang masing-masing 10 orang psikolog dan 10 orang konselor yang siap membantu para orang tua dalam menangani dan mendampingi permasalahan anak. PUSPAGA melibatkan beberapa instansi sebagai penunjang dalam penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas masalah yang dialami ABK dengan melibatkan Dinas Kesehatan Surabaya, RS dr.Soetomo, RS Haji, RSAL, RS. Soewandhi, praktek pribadi dokter

spesialis (anak, THT, Wicara), lembaga terapi sensori integrasi, okupansi terapi wicara, lembaga pendidikan dan perguruan tinggi yang memiliki laboratorium penanganan ABK.

- Pengintegrasian Program Ketahanan Keluarga dalam konsep *smart city*. Program ketahanan keluarga yang diterapkan di Kota Surabaya sangat penting. Karena akan sangat berpengaruh terhadap masa depan anak yang kelak akan meneruskan estafet bangsa. Apapun yang terjadi di negara ini kedepannya, akan bergantung pada pendidikan terhadap anak-anak. Oleh karena itu, penanganan yang kita lakukan terhadap anak, harus komprehensif. Konsep *smart city* ini mencakup *smart government*, *smart economy*, *smart environment*, *smart living*, *smart people* dan *smart mobility*.

IX. REKOMENDASI

Setelah mendengarkan paparan dan penjelasan dari Walikota Surabaya dan berdiskusi dengan pemangku kepentingan yang diundang terkait pembangunan kependudukan di Kota Surabaya, berikut beberapa rekomendasi yang dapat disimpulkan:

- a. Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kota Surabaya yang telah begitu inovatif dan kreatif mengarusutamakan pembangunan kependudukan dan keluarga dalam keseluruhan program pembangunan di Kota Surabaya.
- b. Melihat keberhasilan Kota Surabaya dengan berbagai program-program yang mengintegrasikan kependudukan dengan ekonomi dan lingkungan, Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN RI untuk mengadopsi pendekatan yang digunakan Pemerintah Kota Surabaya dan design pembangunan kependudukan dan ketahanan keluarga.
- c. Komisi IX DPR RI akan mengadendakan rapat dengan seluruh *stakeholder* bidang kependudukan dan mengundang Walikota Surabaya, ibu Tri Rismaharini untuk dapat hadir guna menyampaikan inovasi program kependudukan sehingga menjadi pembelajaran secara nasional.

X. PENUTUP

Demikian Laporan Kunker Spesifik tentang Akselerasi Keberhasilan Program Keluarga Berencana ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur ini kami susun. Semoga dapat menjadi masukan bagi seluruh pihak terkait khususnya BKKBN sebagai Lembaga yang bertanggungjawab terhadap pembangunan kependudukan.

Atas segala bantuan dan kerjasama yang baik dari mitra kerja Komisi IX DPR RI, Pemerintah Daerah Kota Surabaya, Kepala Dinas, Petugas KB, dan instansi terkait serta khususnya masyarakat setempat yang telah membantu kelancaran selama Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Februari 2020

**TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI
KE KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
KETUA**

H. ANSORY SIREGAR, Lc
A- 414